



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**

*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*



PA3KN

OVERVIEW PAGU ANGGARAN 2026 MITRA KERJA KOMISI V DPR RI

Pengarah:

Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.
Plt. Kepala Badan Keahlian DPR

Penanggungjawab:

Dr. Hj. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn., QGIA, QHIA., QIA., PQIA.
Kepala Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal DPR RI

Penulis:

Achmad Yugo Pidhegso, S.E., M.E.
Muhammad Anggara Tenriatta Siregar, S.E.

Pagu RAPBN 2026 (triliun Rp)

118,5

Pagu Indikatif 2026 (triliun Rp)

70,86

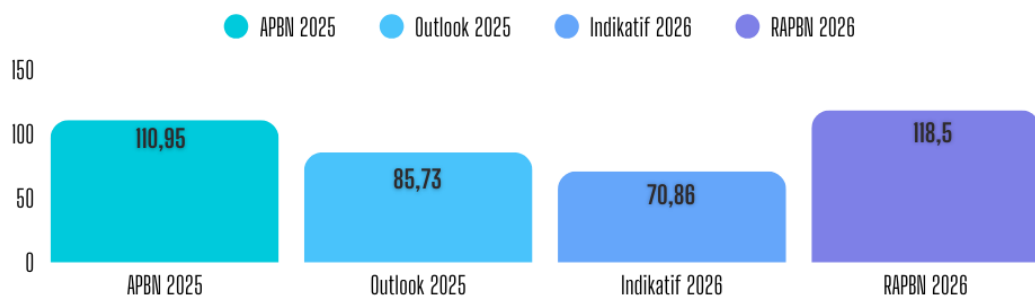
APBN 2025
(triliun Rp)

110,95

Outlook 2025
(triliun Rp)

85,73

PERKEMBANGAN PAGU DAN REALISASI BELANJA K/L



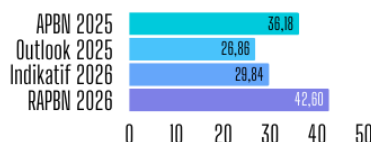
Sumber : Nota Keuangan RAPBN TA 2026, KEM-PPKF Tahun 2026

BELANJA PER PROGRAM

Dukungan Manajemen (triliun Rp)



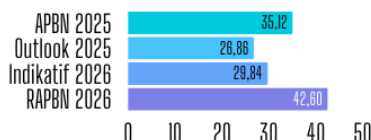
Ketahanan Sumber Daya Air (triliun Rp)



Perumahan dan kawasan Permukiman (triliun Rp)



Infrastruktur Konektivitas (triliun Rp)

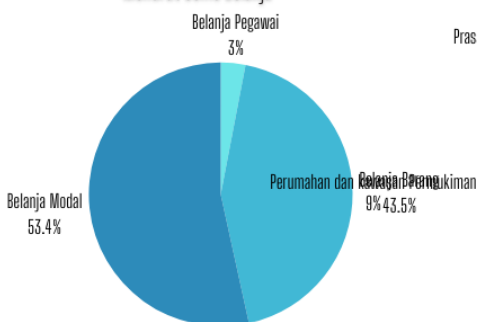


Prasarana Strategis (triliun Rp)

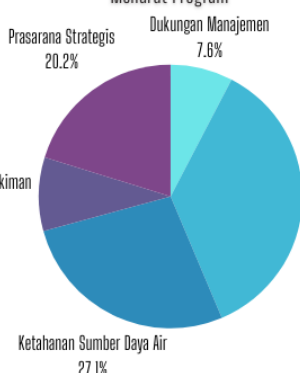


PROFIL ALOKASI APBN 2025

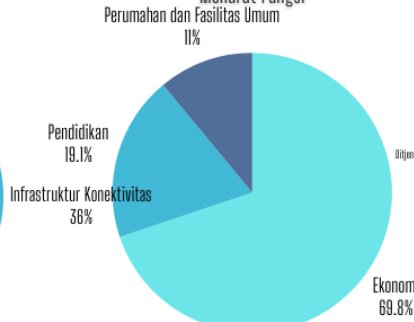
Menurut Jenis Belanja



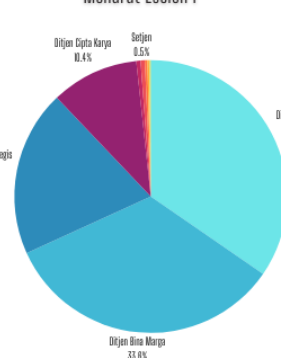
Menurut Program



Menurut Fungsi

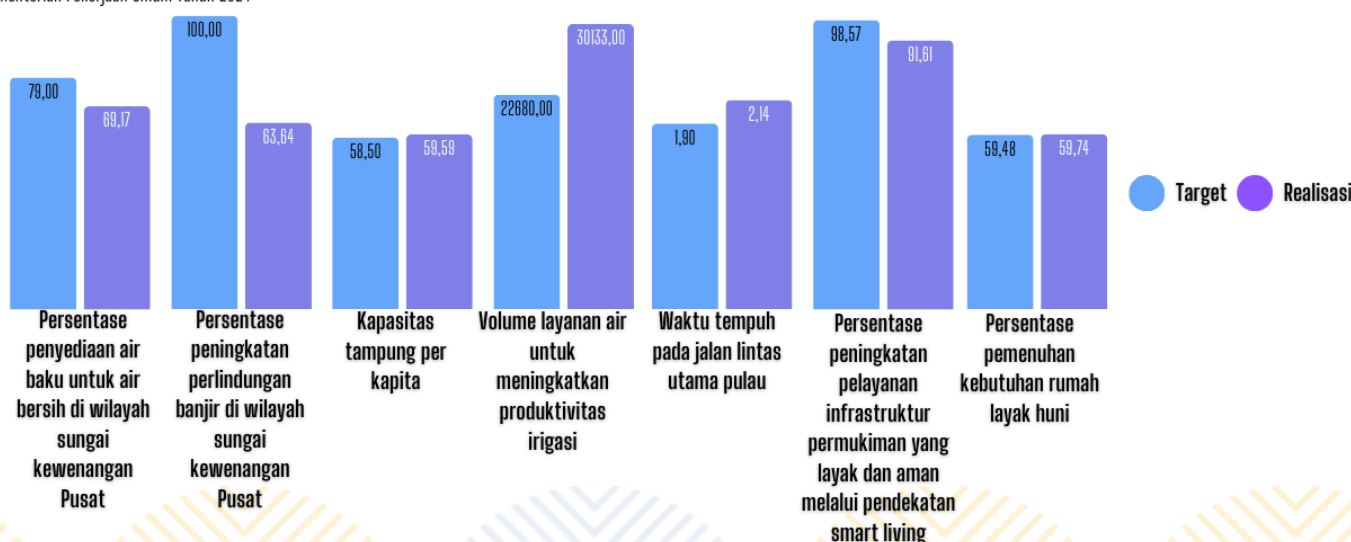


Menurut Eselon I



INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sumber : Laporan Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2024



***Highlights Overview* Pagu Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2026**

- Tahun 2026, **Kementerian Pekerjaan Umum** (KemenPU) memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp118,5 triliun, mengalami kenaikan sebesar 6,80% dari APBN Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp110,95 triliun. Alokasi anggaran ini mengalami peningkatan 67,23% dari Pagu Indikatif yaitu Rp70,86 triliun.
- Pagu anggaran tahun 2026 tersebut dialokasikan pada 5 (lima) program yaitu:
 - Program Infrastruktur Konektivitas sebesar Rp42,61 triliun atau 36% dari total pagu.
 - Program Ketahanan Sumber Daya Air sebesar Rp32,10 triliun atau 27,12% dari total pagu.
 - Program Prasarana Strategis sebesar Rp23,91 triliun atau 20,2% dari total pagu.
 - Program Perumahan dan kawasan Permukiman sebesar Rp10,69 triliun atau 9,04% dari total pagu.
 - Program Dukungan Manajemen sebesar Rp9,05 triliun atau 7,65% dari total pagu.
- Menurut jenisnya, belanja Kementerian Pekerjaan Umum di tahun 2025 dibagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu:
 - Belanja Modal sebesar Rp59,29 triliun atau 53,4% dari total pagu.
 - Belanja Barang sebesar Rp48,31 triliun atau 43,5% dari total pagu.
 - Belanja Pegawai sebesar Rp3,35 triliun atau 3% dari total pagu.
- Beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) di dalam Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Pekerjaan Umum menunjukkan capaian kinerja yang kurang baik dimana terdapat 7 (tujuh) IKU dengan kondisi hanya 3 (tiga) diantaranya memiliki capaian 100%, maka terdapat 4 (empat) IKU yang tidak mencapai target di tahun 2024 yaitu persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat, persentase peningkatan perlindungan banjir di wilayah sungai kewenangan Pusat, Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau, dan persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui *pendekatan smart living*.
- Dalam RPJMN Tahun 2025 – 2030, terdapat beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum antara lain adalah Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional, *Giant Sea Wall* Pantai Utara Jawa, Bendungan Way Apu, Bendungan Jragung, Bendungan Mbay, Bendungan Bulango Ulu, SPAM Regional Wosusokas, SPAM Regional Benteng – Kobema, Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Jalan Tol Serang – Panimbang, Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi, dan Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban.

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 memiliki target Kemantapan Jalan Nasional sebesar 97% pada tahun 2024, namun target tersebut tidak tercapai yaitu dengan capaian tahun 2024 hanya mencapai 95,22%. Hal ini perlu mendapatkan perhatian walaupun pada RPJMN 2025 – 2029 tidak menyebutkan adanya target terkait Kemantapan Jalan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas jalan merupakan bagian vital dari perekonomian Indonesia khususnya dalam hal mendukung kelancaran distribusi logistik. Selain dari sisi ekonomi, kualitas jalan juga memiliki dampak terhadap risiko keselamatan pengguna jalan.
- Salah satu hal yang mempengaruhi kondisi jalan adalah fenomena kendaraan *Over Dimension Overload* (ODOL). Kementerian Pekerjaan Umum perlu untuk berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait untuk mengatasi kendaraan ODOL agar meminimalisir kerusakan jalan yang diakibatkan oleh kendaraan ODOL. Perlu menjadi perhatian bahwa kerusakan jalan menimbulkan konsekuensi anggaran yaitu bertambahnya kebutuhan anggaran untuk preservasi jalan.

Pagu RAPBN 2026 (triliun Rp)

28,48

Pagu Indikatif 2026 (triliun Rp)

24,40

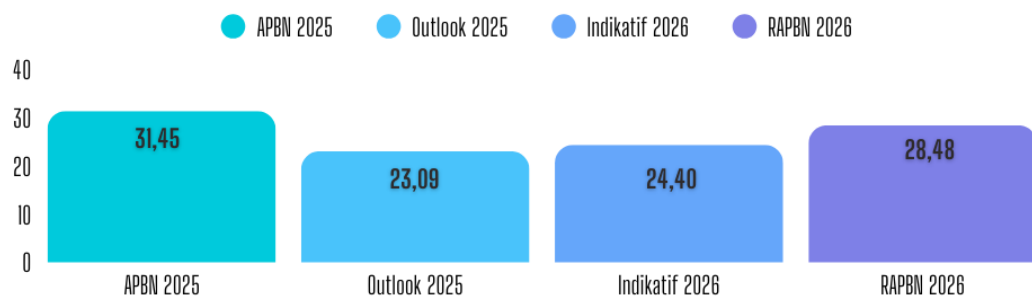
APBN 2025
(triliun Rp)

31,45

Outlook 2025
(triliun Rp)

23,09

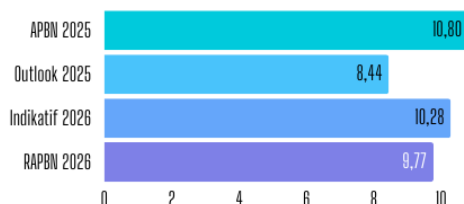
PERKEMBANGAN PAGU DAN REALISASI BELANJA K/L



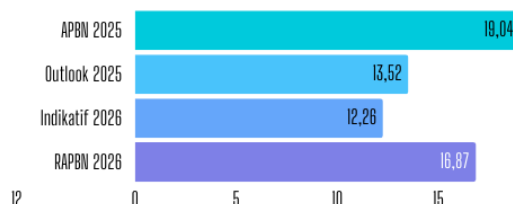
Sumber : Nota Keuangan RAPBN TA 2026, KEM-PPKF Tahun 2026

BELANJA PER PROGRAM

Dukungan Manajemen (triliun Rp)



Infrastruktur Konektivitas (triliun Rp)

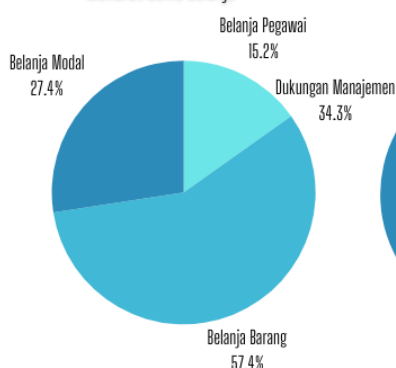


Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (triliun Rp)



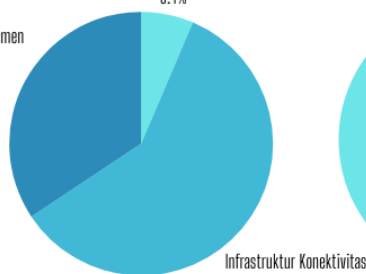
PROFIL ALOKASI APBN 2025

Menurut Jenis Belanja

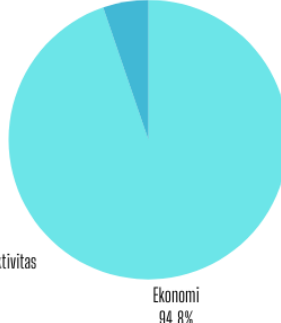


Menurut Program

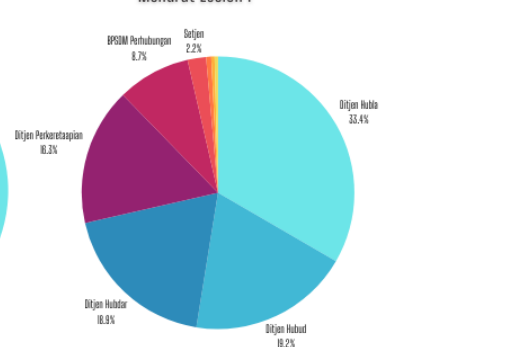
Pendidikan dan Pelatihan Vokasi



Menurut Fungsi Pendidikan

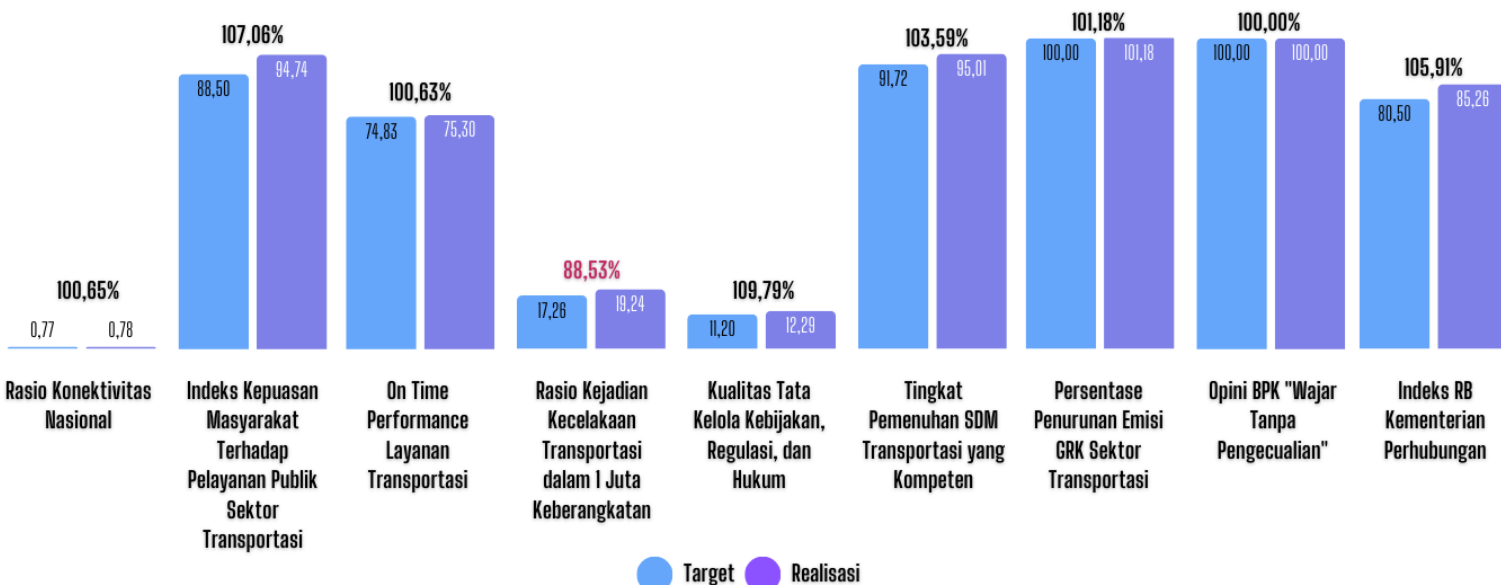


Menurut Eselon I



INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sumber : Laporan Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2024



Highlights Overview Pagu Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2026

- Tahun 2026, **Kementerian Perhubungan** (Kemenhub) memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp28,48 triliun, turun sebesar 9,43% dari APBN Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp31,45 triliun. Alokasi anggaran ini mengalami peningkatan 16,73% dari Pagu Indikatif yaitu Rp24,40 triliun.
- Pagu anggaran tahun 2026 tersebut dialokasikan pada 3 (tiga) program yaitu:
 - Program Infrastruktur Konektivitas sebesar Rp16,87 triliun atau 59,24% dari total pagu.
 - Program dukungan manajemen sebesar Rp9,77 triliun atau 34,32% dari total pagu.
 - Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebesar Rp1,83 triliun atau 6,44% dari total pagu.
- Menurut jenisnya, belanja Kementerian Perhubungan di tahun 2026 dibagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu:
 - Belanja Barang sebesar Rp18,05 triliun atau 57,4% dari total pagu.
 - Belanja Modal sebesar Rp8,64 triliun atau 27,5% dari total pagu.
 - Belanja Pegawai sebesar Rp4,76 triliun atau 15,2% dari total pagu.
- Beberapa IKU di dalam Lkj Kementerian Perhubungan menunjukkan capaian kinerja yang baik dimana terdapat 9 (sembilan) IKU dengan kondisi 8 (delapan) diantaranya memiliki capaian 100%. Hanya terdapat satu IKU yang tidak mencapai target yaitu “Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dalam 1 Juta Keberangkatan” dengan tingkat capaian 88,53%. Kementerian Perhubungan perlu untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keselamatan transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian terutama terkait dengan usia armada. Selain itu, perlu ditambahkan program sertifikasi keselamatan bagi seluruh operator transportasi serta edukasi keselamatan bagi masyarakat pengguna moda transportasi. Hal ini perlu dilakukan tidak hanya dalam usaha untuk mencapai target IKU namun menghadirkan transportasi yang aman bagi masyarakat Indonesia.
- Dalam RPJMN Tahun 2025 – 2029, terdapat beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan antara lain Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu, Pembangunan Pelabuhan Patimban, dan Pembangunan Jakarta Metropolitan *Mass Rapid Transit* Koridor Timur-Barat.
- PSN Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu merupakan program *carry over*. Terkait dengan program ini, perlu diketahui bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah melakukan pemeriksaan dimana disimpulkan bahwa terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku atas pengelolaan Belanja Pembangunan Pelabuhan Patimban yaitu kelebihan pembayaran dua paket pekerjaan konstruksi yang bersumber dari dana SBSN pada wilayah *backup area* Pelabuhan Patimban

sebesar Rp2,24 miliar, pelaksanaan tiga paket pekerjaan supervisi pada wilayah *backup area* Pelabuhan Patimban tidak Sesuai ketentuan sebesar Rp468,62 juta, dan pengelolaan barang milik negara hasil kontrak Pembangunan Pelabuhan Patimban tidak Sesuai ketentuan sebesar Rp765,76 juta. Hal ini perlu menjadi perhatian. Dalam hal tata kelola keuangan, Kementerian Perhubungan perlu untuk melakukan tindak lanjut rekomendasi BPK RI terutama terhadap temuan terkait PSN. Hal ini perlu dilakukan agar anggaran Kementerian Perhubungan direalisasikan dengan mengedepankan prinsip Akuntabilitas.

- Selain terkait dengan keselamatan transportasi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran, Kementerian Perhubungan perlu untuk berkoordinasi dengan seluruh *stakeholder* terkait dalam menyikapi perkembangan industri transportasi termasuk dengan adanya transportasi umum berbasis aplikasi. Agar perkembangan dalam sektor transportasi dapat berjalan dengan payung hukum yang jelas dengan mengedepankan kepentingan masyarakat secara luas.

Pagu RAPBN 2026 (miliar Rp)

10.895,5

Pagu Indikatif 2026 (miliar Rp)

1.824,8

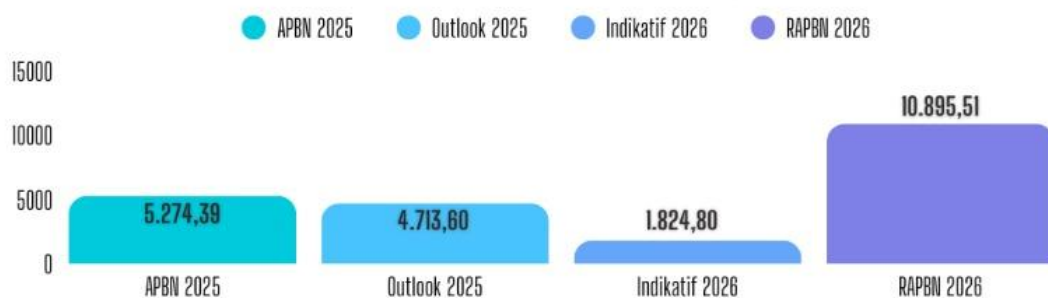
APBN 2025
(miliar Rp)

5.274,39

Outlook 2025
(miliar Rp)

4.713,60

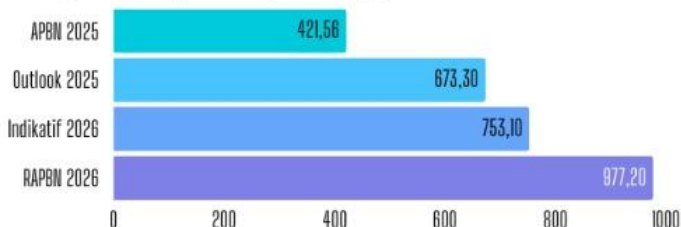
PERKEMBANGAN PAGU DAN REALISASI BELANJA K/L



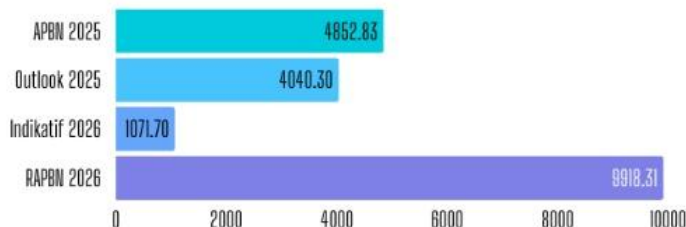
Sumber : Nota Keuangan RAPBN TA 2026, KEM-PPKF Tahun 2026

BELANJA PER PROGRAM

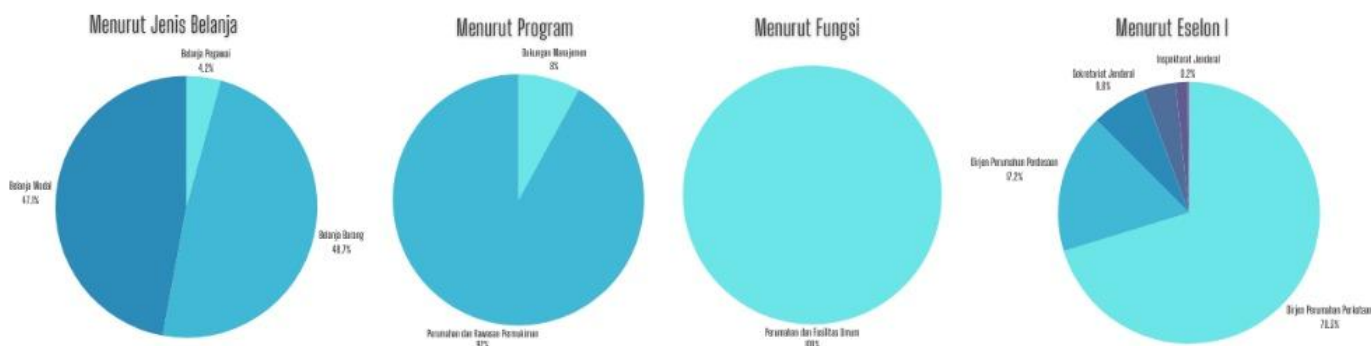
Dukungan Manajemen (miliar Rp)



Perumahan dan Kawasan Permukiman (miliar Rp)



PROFIL ALOKASI APBN 2025



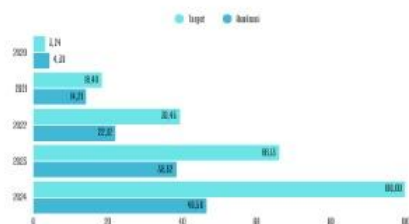
INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sumber : Laporan Kinerja Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Tahun 2024

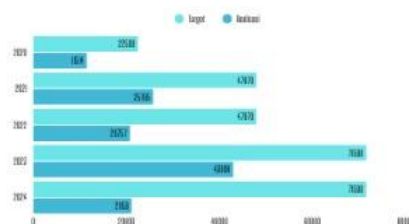
Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni



Persentase rumah MBR yang mendapat bantuan PSU



Jumlah rumah umum yang mendapat bantuan PSU



Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah layak huni melalui Fasilitas Rumah Swadaya bagi MBR



Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah layak huni melalui Pembangunan Rumah Khusus



Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah layak huni melalui Pembangunan Rumah Susun



***Highlights Overview* Pagu Anggaran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2026**

- **Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (KemendesPDT)** bertugas menyelenggarakan sub-urusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. KemendesPDT juga menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pengembangan ekonomi dan investasi desa, dan penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal.
- Tahun 2026, KemendesPDT memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp2.504,20 miliar, meningkat hingga 14,22% dari APBN Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp2.192,40 miliar. Meski begitu, alokasi anggaran ini masih lebih rendah jika dibandingkan pagu kebutuhan anggaran yang diajukan oleh Kementrans yang mencapai Rp3.368,71 miliar. Selisih kebutuhan pagu anggaran ini dikhawatirkan akan membuat kinerja pembangunan desa dan daerah tertinggal kurang berjalan efektif.
- Sebelumnya, pagu indikatif KemendesPDT yang disampaikan pada Pembicaraan Pendahuluan sebelumnya mencapai Rp1.591,80 miliar atau hanya 47,25% dari kebutuhan pagu anggaran yang disampaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah meningkatkan anggaran KemendesPDT untuk tahun 2026 dari pagu indikatif ke pagu anggaran, dengan pertimbangan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, mempercepat pencapaian target pembangunan desa dan daerah tertinggal serta memastikan keberlanjutan program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029.
- Pagu anggaran tahun 2026 dialokasikan pada program Kementerian diantaranya Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sebesar Rp1.894,80 miliar atau sebesar 75,66% dari total pagu, dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp609,40 miliar atau sebesar 24,34% dari total pagu.
- Pagu Anggaran KemendesPDT ini akan dialokasikan sebesar 75,3% untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain melalui kegiatan pendampingan desa, pengembangan obyek wisata desa dan perdesaan, pembangunan sarana dan prasarana perdagangan desa dan perdesaan, pembangunan sarana pelayanan dasar desa dan perdesaan, fasilitasi pengembangan BUMDes, peningkatan kapasitas masyarakat di daerah tertinggal di bidang sosial budaya dan kelembagaan. Sedangkan 24,7% lainnya untuk

mendukung prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pelatihan masyarakat desa dan daerah tertinggal.

- Menurut jenisnya, belanja KemendesPDT di tahun 2025 dibagi dalam 3 jenis, di antaranya belanja pegawai dengan porsi 11,50% dari total anggaran 2025; belanja barang 88,20%; dan belanja modal 0,40%. Menurut fungsinya, belanja KemendesPDT di tahun 2025 dialokasikan seluruhnya untuk melaksanakan Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum.
- Beberapa IKU di dalam Lkj Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemendesPD TT) Tahun 2024 menunjukkan beberapa capaian yang belum mencapai target RPJMN Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024. Di dalam RPJMN 2020-2024, terdapat 13 indikator pembangunan nasional yang berkaitan langsung dengan KemendesPDT, sedangkan 15 indikator mendukung sasaran strategis di dalam Renstra 2020-2024 yang telah disusun.
- Dari total 28 indikator, terdapat 3 indikator pembangunan nasional di dalam RPJMN 2020-2024 dan 4 indikator di dalam Renstra 2020-2024 yang belum tercapai, antara lain persentase desa berkembang, persentase desa tertinggal, persentase penduduk miskin di daerah tertinggal, nilai rata-rata capaian SDGs Desa, persentase dokumen pengembangan kebijakan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang diimplementasikan dan atau menjadi rujukan dalam pelaksanaan kebijakan, persentase ASN Kementerian yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan, dan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KemendesPD TT.
- Di dalam RPJMN Tahun 2025-2029, Pemerintah menargetkan pada tahun 2025 persentase desa mandiri mencapai 23,29% dan di tahun 2029 mencapai 25,79%. Di tahun 2024, persentase desa mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun baru mencapai 23,02%. Jika melihat rata-rata pertumbuhan desa mandiri dalam beberapa tahun terakhir, angka ini terbilang cukup realistis untuk dicapai bahkan melampaui target di tahun 2029. Meski begitu, Pemerintah tetap harus berfokus pada upaya penguatan kapasitas desa, peningkatan kualitas layanan dasar, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta penguatan tata kelola dan partisipasi masyarakat agar pertumbuhan desa mandiri tidak hanya sekadar memenuhi target kuantitatif, tetapi juga berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah.

Pagu RAPBN 2026 (miliar Rp)

10.895,5

Pagu Indikatif 2026 (miliar Rp)

1.824,8

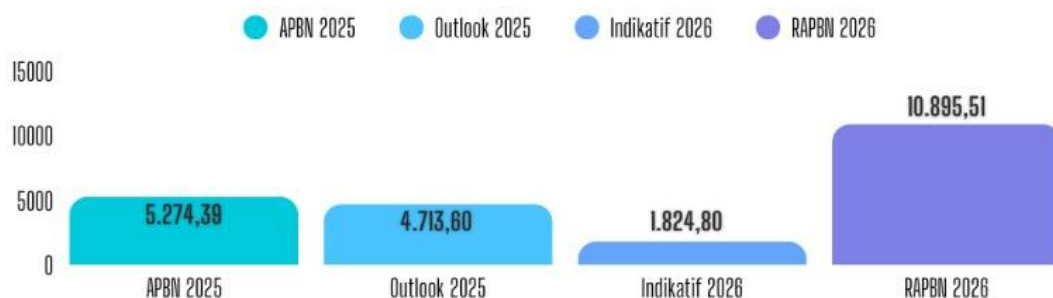
APBN 2025
(miliar Rp)

5.274,39

Outlook 2025
(miliar Rp)

4.713,60

PERKEMBANGAN PAGU DAN REALISASI BELANJA K/L



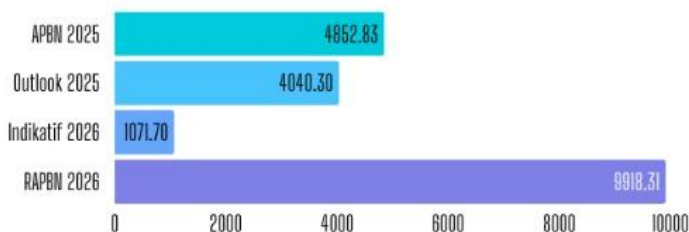
Sumber : Nota Keuangan RAPBN TA 2026, KEM-PPKF Tahun 2026

BELANJA PER PROGRAM

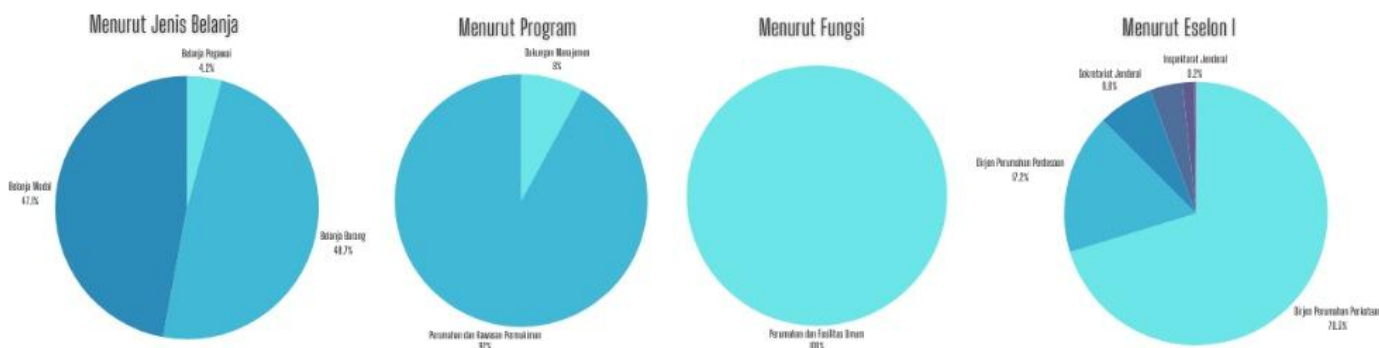
Dukungan Manajemen (miliar Rp)



Perumahan dan Kawasan Permukiman (miliar Rp)



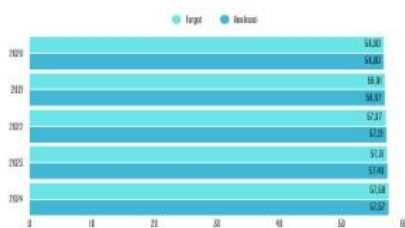
PROFIL ALOKASI APBN 2025



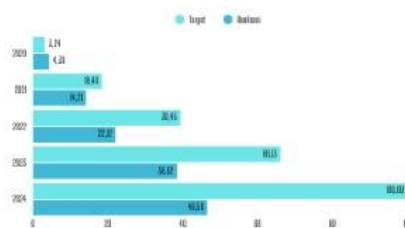
INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sumber : Laporan Kinerja Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Tahun 2024

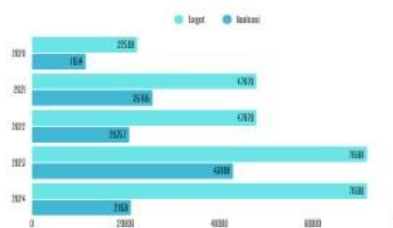
Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni



Persentase rumah MBR yang mendapat bantuan PSU



Jumlah rumah umum yang mendapat bantuan PSU



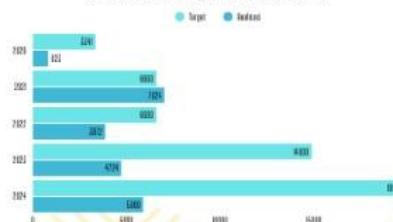
Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah layak huni melalui Fasilitas Rumah Swadaya bagi MBR



Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah layak huni melalui Pembangunan Rumah Khusus



Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah layak huni melalui Pembangunan Rumah Susun



***Highlights Overview* Pagu Anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2026**

- **Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP)** bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan sub-urusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian PKP juga menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, penyelenggaraan pembangunan perumahan di kawasan perdesaan dan perkotaan, serta penyelenggaraan tata kelola dan manajemen risiko.
- Tahun 2026, Kementerian PKP memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp10.895,50 miliar, meningkat hingga 106,57% dari APBN Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp5.274,39 miliar. Meski begitu, alokasi anggaran ini masih cukup jauh jika dibandingkan pagu kebutuhan anggaran yang diajukan oleh Kementerian PKP yang mencapai Rp49.854,03 miliar. Peningkatan alokasi ini didorong untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang merupakan salah satu program dalam mendukung Prioritas Nasional.
- Sebelumnya, Pagu Indikatif Kementerian PKP hanya mencapai Rp1.824,80 miliar atau hanya 16,75% dari alokasi pagu anggaran yang diberikan. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah sudah mulai berfokus pada pembangunan sektor perumahan mengingat program 3 juta rumah merupakan salah satu program unggulan pemerintah saat ini, meskipun anggaran yang dibutuhkan masih cukup besar jika dibandingkan dengan alokasi pagu anggaran.
- Pagu anggaran tahun 2026 tersebut dialokasikan pada program Kementerian diantaranya Program Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp9.918,30 miliar atau sebesar 91,03% dari total pagu, dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp977,2 miliar atau sebesar 8,97% dari total pagu.
- Pagu Anggaran Kementerian PKP ini akan dialokasikan sebesar 89,5% untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Pembangunan Rusun, Pembangunan Rumah Khusus, PSU Rumah Umum, dan Penanganan Kawasan Kumuh dan Sanitasi. 10,6% lainnya akan digunakan untuk mendukung prioritas lainnya, seperti beberapa kegiatan pada program dukungan manajemen dan program dukungan fisik lainnya.

- Menurut jenisnya, belanja Kementerian PKP di tahun 2025 dibagi dalam 3 jenis, di antaranya belanja pegawai dengan porsi 4,23% dari total anggaran 2025; belanja barang 48,67%; dan belanja modal 47,10%. Menurut fungsinya, belanja Kementerian PKP di tahun 2025 dialokasikan seluruhnya untuk melaksanakan Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum.
- Beberapa IKU di dalam Lkj Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024 menunjukkan capaian yang tidak begitu memuaskan dengan capaian yang melebihi target Renstra 2020-2024 hanya 2 dari 6 indikator pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, di antaranya indikator jumlah pemenuhan kebutuhan rumah layak huni melalui Fasilitas Rumah Swadaya bagi MBR yang mencapai 101,62% dan Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah layak huni melalui Pembangunan Rumah Khusus yang mencapai 164,22%.
- Sementara itu, beberapa indikator yang belum mencapai target, di antaranya yaitu persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni yang mencapai 99,99%, persentase rumah bagi MBR yang mendapat bantuan PSU yang mencapai 46,58%, jumlah rumah umum yang mendapat bantuan PSU yang mencapai 46,58%, dan jumlah pemenuhan kebutuhan rumah layak huni melalui pembangunan Rumah Susun yang mencapai 43,52%.
- Selain itu, jika dibandingkan dengan target pada RPJMN Tahun 2020-2024, target sektor perumahan pada tahun 2024 tidak tercapai. Di dalam RPJMN 2020-2024, Pemerintah menargetkan 70% Rumah Tangga menempati hunian layak dan terjangkau pada tahun 2024. Sedangkan, Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2024 Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak hanya tercapai 65,25%. Hal ini menunjukkan bahwa target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah tidak tercapai selama 5 tahun.
- Di dalam RPJMN Tahun 2025-2029, Pemerintah menargetkan pada tahun 2025 Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan mencapai 67% dan di tahun 2029 mencapai 74%. Hal ini menjadi pekerjaan yang cukup berat bagi Pemerintah mengingat rata-rata pertumbuhan dalam 5 tahun terakhir hanya mencapai 2,92% per tahun.
- Oleh karena itu, Pemerintah perlu memperhatikan tantangan dalam pelaksanaan program, baik dari aspek teknis, regulasi, kapasitas kelembagaan, maupun koordinasi antar pihak yang terlibat agar tidak terjadi ketimpangan antara alokasi anggaran dengan rendahnya serapan atau capaian output fisik, seperti yang terjadi pada capaian di tahun 2024.

Pagu RAPBN 2026 (miliar Rp)

2.504,20

Pagu Indikatif 2026 (miliar Rp)

1.591,80

APBN 2025
(miliar Rp)

2.192,39

Outlook 2025
(miliar Rp)

2.211,90

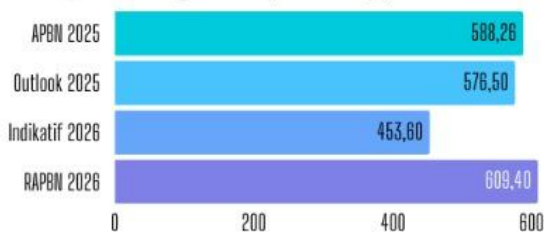
PERKEMBANGAN PAGU DAN REALISASI BELANJA K/L



Sumber : Nota Keuangan RAPBN TA 2026, KEM-PPKF Tahun 2026

BELANJA PER PROGRAM

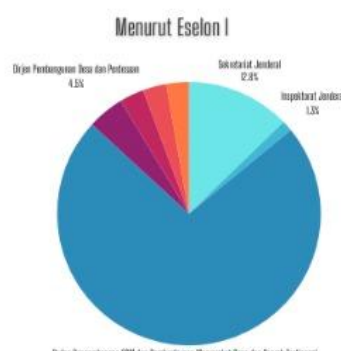
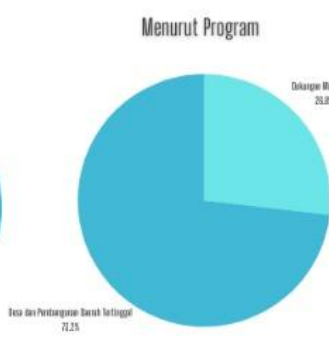
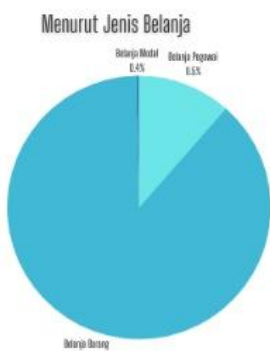
Dukungan Manajemen (miliar Rp)



Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (miliar Rp)



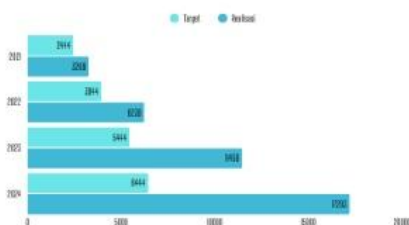
PROFIL ALOKASI APBN 2025



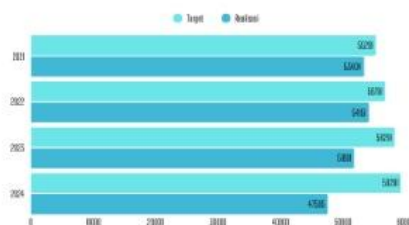
INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sumber : Laporan Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2024

Jumlah Desa Mandiri



Jumlah Desa Berkembang



Jumlah Desa Tertinggal



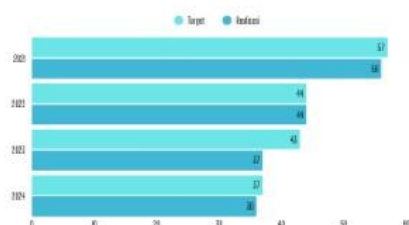
Nilai rata-rata IPM di daerah tertinggal



Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal



Jumlah kabupaten yang termasuk daerah tertinggal



Highlights Overview Pagu Anggaran Kementerian Transmigrasi Tahun 2026

- **Kementerian Transmigrasi (Kementrans)** bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementrans juga menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, serta pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi.
- Tahun 2026, Kementrans memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp1.920,00 miliar, meningkat cukup signifikan hingga 153,92% dari APBN Tahun Anggaran 2025 yang hanya mencapai Rp122,40 miliar. Meski begitu, alokasi anggaran ini masih lebih rendah jika dibandingkan pagu kebutuhan anggaran yang diajukan oleh Kementrans yang mencapai Rp2.231,13 miliar. Selisih kebutuhan pagu anggaran ini dikhawatirkan akan membuat kinerja pembangunan dan penyelenggaraan transmigrasi kurang berjalan efektif.
- Pagu indikatif Kementrans yang disampaikan pada Pembicaraan Pendahuluan sebelumnya juga mencapai Rp1.920,0 miliar atau hanya 85,25% dari kebutuhan pagu anggaran yang disampaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah tidak melakukan perubahan dari pagu indikatif ke pagu anggaran, dengan pertimbangan menjaga konsistensi kebijakan, kepastian perencanaan, serta keterbatasan ruang fiskal yang ada. Oleh karena itu, Kementrans diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan program prioritas secara lebih efisien dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
- Pagu anggaran tahun 2026 dialokasikan pada program Kementerian diantaranya Program Transmigrasi sebesar Rp1.337,60 miliar atau sebesar 70,33% dari total pagu, dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp564,40 miliar atau sebesar 29,67% dari total pagu.
- Pagu Anggaran Kementrans ini akan dialokasikan sebesar 64,4% untuk mendukung Program Prioritas Arahan Presiden melalui program Transformasi Transmigrasi dengan program 5T, yaitu Transmigrasi Tuntas, Transmigrasi Lokal, Transmigrasi Patriot, Transmigrasi Karya Nusa dan Transmigrasi Gotong Royong. 29,7% anggaran merupakan program dukungan manajemen dalam mendukung Program Prioritas dan Asta Cita 2 dan 6. Dan 5,9% lainnya untuk pemberian *mandatory* untuk Transmigran pada Satuan Permukiman Bina.
- Menurut jenisnya, belanja Kementrans di tahun 2025 dibagi dalam 3 jenis, di antaranya belanja pegawai dengan porsi 33,00% dari total anggaran 2025; belanja barang 66,80%; dan belanja modal 0,20%. Menurut fungsinya, belanja Kementrans di tahun 2025 dialokasikan seluruhnya untuk melaksanakan Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum.

- Beberapa IKU di dalam Lkj Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Ditjen PPK Trans Kemendes PDTT) Tahun 2024 menunjukkan capaian yang cukup baik dengan capaian seluruh indikator yang melebihi target Renstra 2020-2024, termasuk di antaranya indikator sektor transmigrasi yang tertuang pada RPJMN Tahun 2020-2024. Di dalam RPJMN 2020-2024, Pemerintah menargetkan rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi yang direvitalisasi pada tahun 2024 mencapai 57,50%. Sedangkan di dalam Lkj Ditjen PPK Trans Tahun 2024 disampaikan bahwa rata-rata nilai indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi prioritas nasional yang direvitalisasi telah mencapai 58,63%.
- Di dalam RPJMN Tahun 2025-2029, Kementrans berkontribusi memberikan dukungan pada pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) 2 dan 6. Di dalam PN 2, Kementrans berkontribusi mendukung Program Prioritas (PP) 10, yaitu swasembada pangan serta swasembada energi, air dan ekonomi melalui berbagai program pada bidang di Kawasan transmigrasi. Di dalam PN 6, Kementrans berkontribusi mendukung PP 7 yaitu peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan melalui intervensi lintas sektor, yang salah satunya berfokus pada sasaran pengembangan Kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal.
- Selanjutnya, Pemerintah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap capaian dan kendala yang masih dihadapi dalam pembangunan kawasan transmigrasi, termasuk aspek kelembagaan, pendanaan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Evaluasi tersebut penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan tidak hanya berfokus pada pemenuhan target indikator semata, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat transmigran, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat integrasi sosial budaya, serta menjamin keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya, Pemerintah perlu merumuskan strategi kebijakan yang lebih adaptif, sinergis, dan berbasis data dengan melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat setempat agar pembangunan dan pengembangan Kawasan transmigrasi dapat memberikan manfaat jangka panjang, memperkecil kesenjangan antarwilayah, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional secara berkelanjutan.



OVERVIEW PAGU RAPBN 2026

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Pagu RAPBN 2026 (triliun Rp)

2,68

Pagu Indikatif 2026 (triliun Rp)

1,89

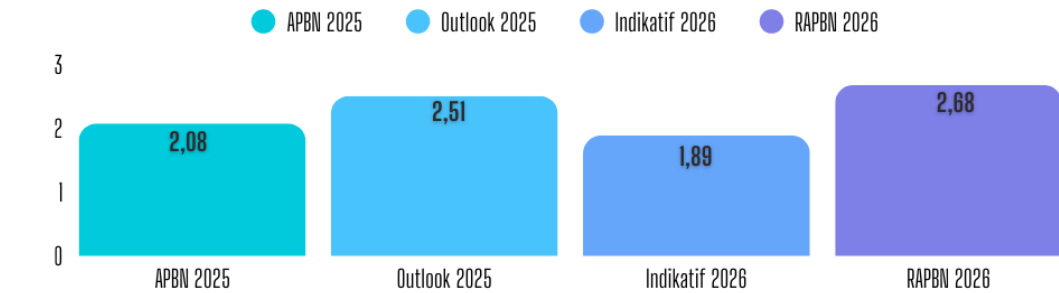
APBN 2025
(triliun Rp)

2,83

Outlook 2025
(triliun Rp)

2,51

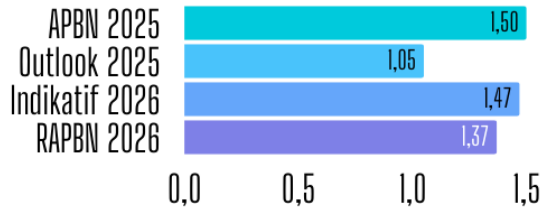
PERKEMBANGAN PAGU DAN REALISASI BELANJA K/L



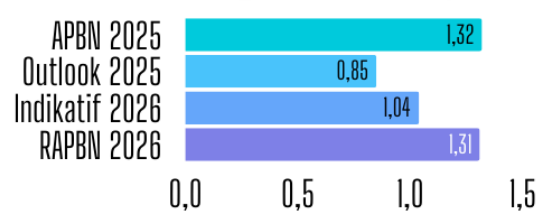
Sumber : Nota Keuangan RAPBN TA 2026, KEM-PPKF Tahun 2026

BELANJA PER PROGRAM

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (triliun Rp)

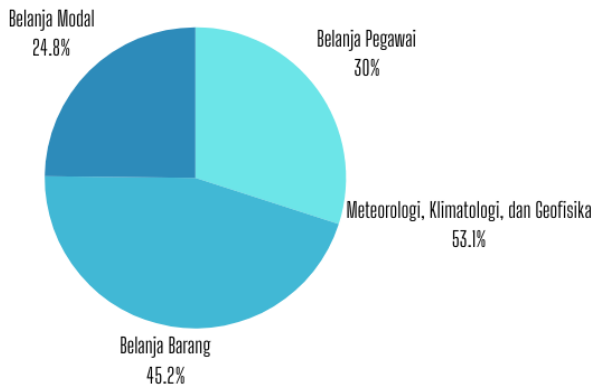


Dukungan Manajemen (triliun Rp)

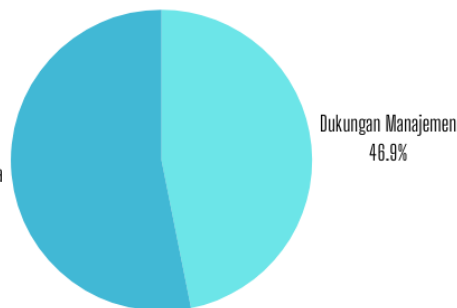


PROFIL ALOKASI APBN 2025

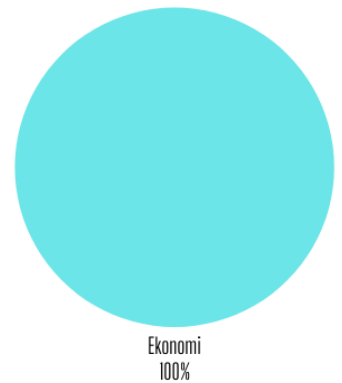
Menurut Jenis Belanja



Menurut Program

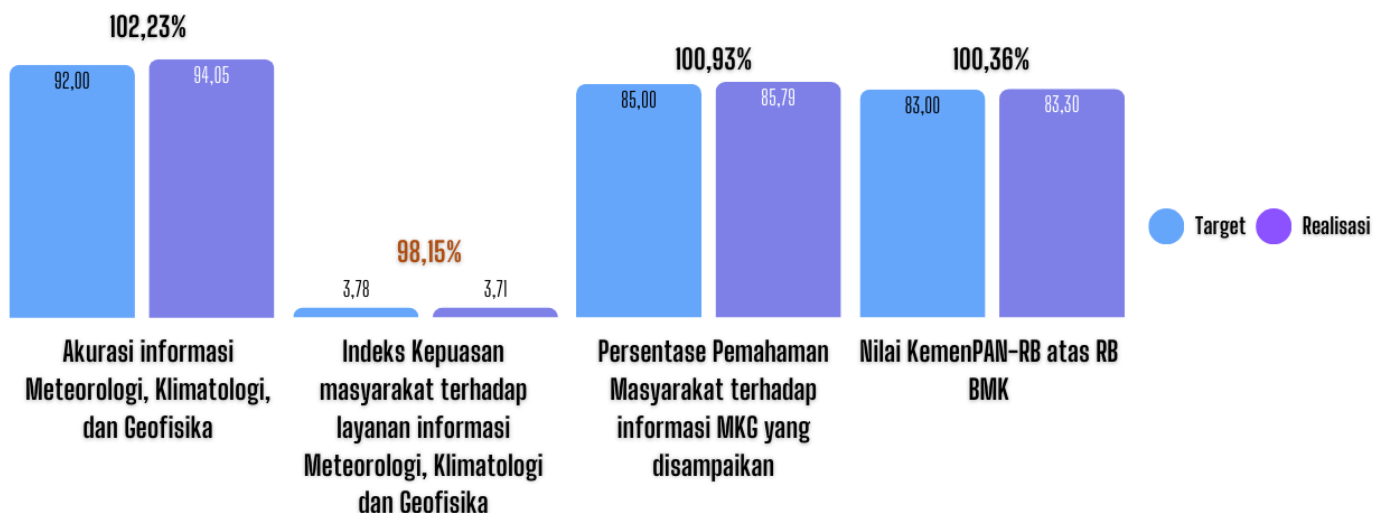


Menurut Fungsi



INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sumber : Laporan Kinerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun 2024



Highlights Overview Pagu Anggaran **Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika** **Tahun 2026**

- Tahun 2026, **Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika** (BMKG) memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp2,675 triliun, mengalami penurunan sebesar 5,34% dari APBN Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp2,826 triliun. Alokasi anggaran ini mengalami peningkatan 41,24% dari Pagu Indikatif yaitu Rp1,894 triliun.
- Pagu anggaran tahun 2026 tersebut dialokasikan pada 2 (dua) program yaitu:
 - Program Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebesar Rp1,369 triliun atau 51,2% dari total pagu.
 - Program Dukungan Manajemen sebesar Rp1,305 triliun atau 48,8% dari total pagu.
- Menurut jenisnya, belanja Kementerian Pekerjaan Umum di tahun 2025 dibagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu:
 - Belanja Barang sebesar Rp1,28 triliun atau 45,2% dari total pagu.
 - Belanja Pegawai sebesar Rp842,24 miliar atau 30% dari total pagu.
 - Belanja Modal sebesar Rp701,93 miliar atau 24,8% dari total pagu.
- Beberapa IKU di dalam Lkj Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menunjukkan capaian kinerja yang baik dimana terdapat 4 (empat) IKU dengan kondisi 3 (tiga) diantaranya memiliki capaian 100%, maka hanya terdapat 1 (satu) IKU yang tidak mencapai target di tahun 2024 yaitu Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dengan ketercapaian target sebesar 98,15%.
- Dalam RPJMN Tahun 2025 – 2030, terdapat Kegiatan Prioritas yang dilaksanakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yaitu Pengelolaan Sumber Daya Air Adaptif Iklim dengan indikator persentase akurasi keberhasilan modifikasi cuaca, dan Peningkatan Layanan Peringatan Dini dan Penanganan Kedaruratan Bencana dengan indikator Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana ke publik. Kedua indikator tersebut bergantung dengan sistem teknologi informasi, kualitas perangkat, dan kemampuan Sumber Daya Manusia. Maka, BMKG perlu untuk melakukan evaluasi dan memiliki rencana pengembangan teknologi informasi, pemutakhiran perangkat, dan peningkatan kompetensi SDM agar dapat meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi BMKG.
- Terkait dengan tugas dan fungsi BMKG sebagai penyedia informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika, BPK RI melakukan pemeriksaan terkait penyelenggaraan peringatan dini bencana. BPK RI mengungkap beberapa permasalahan yaitu adanya kekosongan regulasi terkait peringatan dini banjir yang disebabkan bukan dari luapan daerah aliran sungai, BMKG belum merancang strategi dan media yang efektif untuk penyebarluasan peringatan dini bencana, dan Sistem Informasi Hidrometeorologi, Hidrologi

dan Hidrogeologi (SIH3) tidak dapat dimanfaatkan untuk peringatan dini bencana. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dari sisi regulasi, strategi komunikasi, dan kesiapan sistem informasi dalam pelaksanaan tugas BMKG. Maka, BMKG perlu untuk melakukan tindak lanjut rekomendasi BPK RI agar dapat memberikan layanan deteksi dan penyebarluasan informasi terkait meteorologi, klimatologi, dan geofisika secara optimal kepada masyarakat dan *stakeholder* terkait.

Pagu RAPBN 2026 (miliar Rp)

1.409,70

Pagu Indikatif 2026 (miliar Rp)

1.011,80

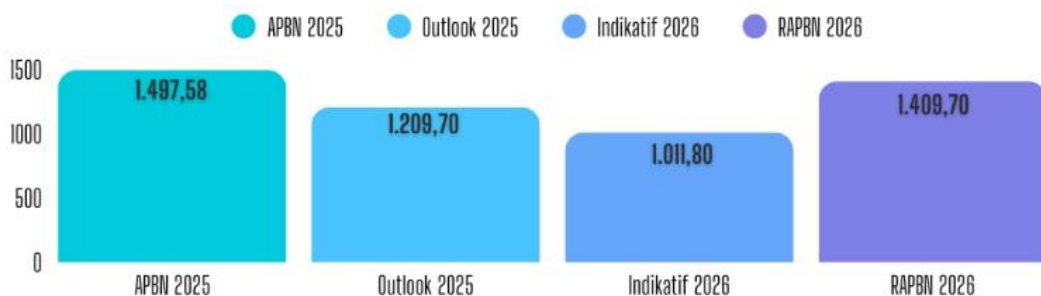
APBN 2025
(miliar Rp)

1.497,58

Outlook 2025
(miliar Rp)

1.209,70

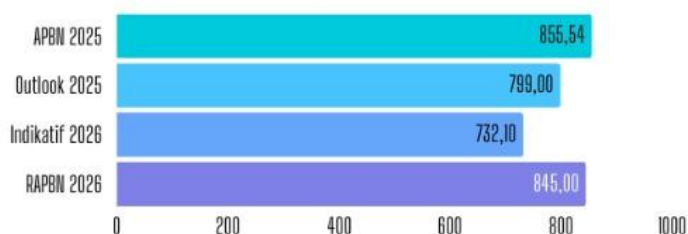
PERKEMBANGAN PAGU DAN REALISASI BELANJA K/L



Sumber : Nota Keuangan RAPBN TA 2026, KEM-PPKF Tahun 2026

BELANJA PER PROGRAM

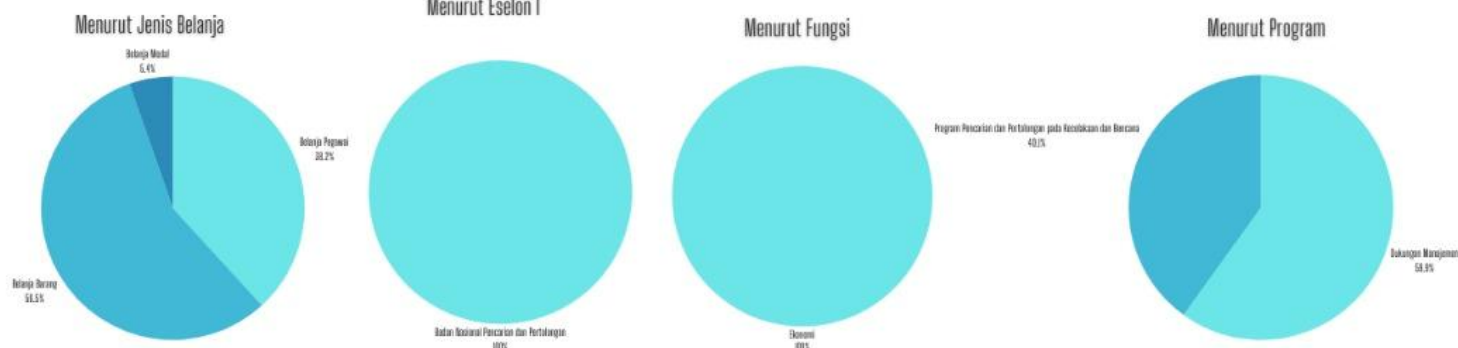
Dukungan Manajemen (miliar Rp)



Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana (miliar Rp)



PROFIL ALOKASI APBN 2025



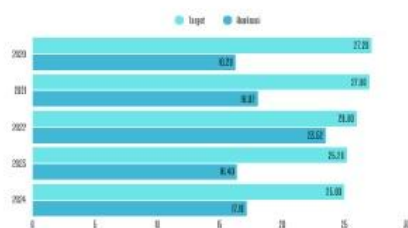
INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sumber : Laporan Kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2024

Indeks Kepuasan Masyarakat



Waktu Tanggap Pencarian dan Pertolongan (menit)



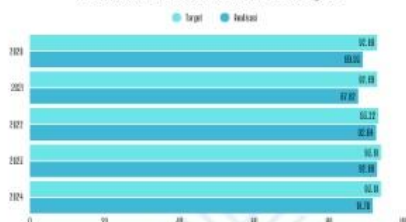
Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan



Tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya Pencarian dan Pertolongan



Tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan



Persentase SOM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat



***Highlights Overview* Pagu Anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2026**

- **Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan** (Basarnas) bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Basarnas juga menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan, pembinaan tenaga dan potensi, sarana dan prasarana, dan sistem komunikasi.
- Tahun 2026, Basarnas memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp1.409,70 miliar, menurun hingga 5,87% dari APBN Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp1.497,58 miliar. Meski begitu, alokasi anggaran ini masih lebih rendah jika dibandingkan pagu kebutuhan anggaran yang diajukan oleh Basarnas yang mencapai Rp2.272,38 miliar di tahun 2026. Selisih kebutuhan pagu anggaran ini dikhawatirkan akan membuat kinerja penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kurang berjalan efektif.
- Pagu indikatif Basarnas yang disampaikan pada Pembicaraan Pendahuluan sebelumnya mencapai Rp1.011,80 miliar atau hanya 44,53% dari kebutuhan pagu anggaran yang disampaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah meningkatkan anggaran Basarnas untuk tahun 2026 dari pagu indikatif ke pagu anggaran, dengan pertimbangan untuk memperkuat kapasitas penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan, meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang memadai guna mendukung tugas dan fungsi Basarnas secara optimal.
- Pagu anggaran tahun 2026 dialokasikan pada program Lembaga diantaranya Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana sebesar Rp564,70 miliar atau sebesar 40,06% dari total pagu, dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp845,00 miliar atau sebesar 59,94% dari total pagu.
- Pagu Anggaran Basarnas ini akan dialokasikan sebesar 37,7% untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain melalui kegiatan pelaksanaan operasi SAR dan pemeliharaan sarana dan prasarana, sistem komunikasi dan teknologi informasi SAR, 3,5% untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Latihan dan siaga SAR, dan peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan SAR.
- Menurut jenisnya, belanja Basarnas di tahun 2025 dibagi dalam 3 jenis, diantaranya belanja pegawai dengan porsi 38,18% dari total anggaran 2025; belanja barang 56,46%; dan belanja modal 5,36%. Menurut fungsinya,

belanja Basarnas di tahun 2025 dialokasikan seluruhnya untuk melaksanakan Fungsi Ekonomi.

- Beberapa IKU di dalam Lkj Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2024 menunjukkan sebagian besar capaian masih belum mencapai target Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024. Di dalam Renstra 2020-2024, terdapat 7 indikator yang mendukung sasaran strategis yang telah disusun.
- Dari total 7 indikator, terdapat 4 indikator yang belum mencapai target, antara lain persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan, tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya Pencarian dan Pertolongan, tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan, dan persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat. Keempat indikator tersebut merupakan tantangan utama yang harus segera ditindaklanjuti oleh Basarnas, mengingat indikator-indikator tersebut berkaitan langsung dengan efektivitas, kesiapan, dan profesionalitas dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Pencapaian yang belum optimal menunjukkan adanya kebutuhan peningkatan kapasitas kelembagaan, pemenuhan sumber daya manusia maupun peralatan, serta penguatan sistem komunikasi dan koordinasi dengan berbagai potensi SAR.
- Di dalam RPJMN Tahun 2025-2029, Pemerintah menargetkan pada tahun 2027 sampai tahun 2029, persentase keberhasilan evakuasi korban Pencarian dan Pertolongan mencapai 98%. Selain itu, Pemerintah menargetkan persentase pemenuhan infrastruktur Pencarian dan Pertolongan mencapai 60,94% dan ketersediaan SDM Pencarian dan Pertolongan yang terlatih mencapai 24.808 orang.